



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1676/SEK/KU.01/9/2020 25 September 2020  
Sifat : Segera  
Hal : Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2020

Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;  
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;  
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;  
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.  
di-  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor : S-737/MK.05/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)-DJBP realisasi anggaran rata-rata per satuan kerja masih di bawah 70%, sehingga perlu disampaikan langkah-langkah percepatan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja agar melakukan revisi atau pergeseran anggaran untuk kebutuhan belanja :
  - a. Pemeliharaan gedung dan bangunan ;
  - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. Penggunaan kebutuhan akun Covid-19;
  - d. Keperluan belanja jasa (listrik, telepon, air);
  - e. Keperluan belanja internet;
  - f. Keperluan sewa rumah dinas hakim.
2. Dalam hal revisi dimaksud agar Pengadilan Tingkat Banding melakukan telaah dan mengambil kebijakan revisi antar satker dilakukan terhadap mata anggaran yang minus di wilayah Pengadilan Tinggi.
3. Segera melakukan pengusulan eselon I dalam hal pengajuan revisi yang membutuhkan persetujuan eselon I.

4. Satuan kerja agar memperhatikan aplikasi capaian kinerja pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) sampai dengan 30 September 2020

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. Drs. W. NUR, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Badan di Mahkamah Agung RI;
5. Para Kepala Biro di Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
7. Pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan.